



AUDIENSI UMUM MINGGUAN DI VATIKAN

Pemandangan selama audiensi umum mingguan Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, di Vatikan, Rabu (24/11).

Kim Jong-un Hukum Mati Pria Korut Karena Menyelundupkan dan Jual Vidio Sguld Game

Tujuh siswa sekolah menengah juga ditangkap karena menonton serial Korea Selatan tersebut.

PYONGYANG(IM) -

Pemerintahan Kim Jong-un telah menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang pria Korea Utara (Korut) karena menyelundupkan dan menjual video copy serial "Squid Game".

Tujuh siswa sekolah menengah juga ditangkap karena menonton serial Korea Selatan yang ditayangkan Netflix tersebut.

Sumber di Korea Utara mengatakan kepada Radio Free Asia (RFA) bahwa pria penyelundup tersebut telah membawa salinan Squid Game dari Tiongkok dan menjual USB flash drive yang berisi serial tersebut. "Eksekusi mati untuk pria itu, akan dilakukan oleh regu tembak," kata sumber tersebut.

Slain itu, seorang siswa yang membeli sebuah drive juga menerima hukuman seumur hidup, sementara enam orang lain yang menonton serial itu telah dijatuhi hukuman kerja paksa selama lima tahun.

Tak hanya itu, para guru dan administrator sekolah dipecah dan menghadapi pengusiran untuk bekerja di tambang terencil. RFA melaporkan pekan lalu bahwa salinan drama kekerasan telah tiba di negara tertutup itu meskipun ada upaya terbaik dari pihak berwenang untuk mencegah media asing. Mereka mulai menyebar di antara orang-orang di flash drive dan kartu SD.

Sumber dalam laporan itu mengatakan bahwa dunia distopia pertunjukan—di mana orang-orang yang terpinggirkan diadu satu sama lain dalam permainan anak-anak tradisional demi hadiah uang tunai yang besar dan mainan yang kalah dihukum mati—beresonansi dengan orang Korea Utara dalam pekerjaan berisiko dan posisi tidak aman.

"Ini semua dimulai minggu lalu ketika seorang siswa sekolah menengah diam-diam membeli USB flash drive yang berisi Squid Game drama Korea Selatan dan

menontonnya dengan salah satu sahabatnya di kelas," kata seorang sumber dalam penegakan hukum di provinsi Hamgyong Utara kepada RFA Korean Service, yang dilansir Kamis (25/11).

"Teman itu memberi tahu beberapa siswa lain, yang menjadi tertarik, dan mereka membagikan flash drive itu kepada mereka. Mereka ditangkap oleh sensor di 109 Sangmu, yang telah menerima petunjuk," kata sumber itu, merujuk pada pasukan pemerintah yang berspesialisasi dalam menangkap penonton video ilegal, yang secara resmi dikenal sebagai Grup Biro Pengawasan 109.

Penangkapan tujuh siswa tersebut menandai pertama kalinya pemerintah menerapkan undang-undang yang baru disahkan tentang "Penghapusan Pemikiran dan Budaya Reaksioner", dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur.

Undang-undang tersebut, yang diumumkan tahun lalu, membawa hukuman mati maksimum untuk menonton, menyimpan, atau mendistribusikan media dari negara-negara kapitalis, terutama dari Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).

"Warga diliputi kecema-

san, karena ketujuh orang itu akan diinterogasi tanpa ampun sampai pihak pengadilan mengetahui bagaimana drama itu diselundupkan dengan perbatasan ditutup karena pandemi virus korona," kata sumber itu.

"Itu berarti angin investasi dan hukuman akan segera berhembus," imbuh sumber itu, menyiratkan bahwa penyelidikan panjang akan mengungkap rantai distribusi karena setiap orang baru yang diselidiki akan dipaksa untuk memberi tahu dari mana mereka mendapatkan salinannya dan dengan siapa berbagi.

Namun, hukuman tidak akan berhenti pada penyelundup dan siswa yang melihat video tersebut, karena orang lain yang tidak terkait dengan insiden tersebut juga akan bertanggung jawab.

"Pemerintah menanggapi kejadian ini dengan sangat serius, dengan mengatakan bahwa pendidikan para siswa terabaikan. Komite Sentral memberhentikan kepala sekolah, sekretaris pemuda, dan wali kelas mereka," kata sumber itu.

"Mereka juga dikeluarkan dari partai. Sudah banyak akan dikirim untuk bekerja paksa di tambang batu bara atau diasingkan ke pedesaan di negara

itu, jadi guru sekolah lain semua khawatir itu bisa terjadi pada mereka juga jika salah satu siswa mereka juga terlibat dalam penyelidikan," kata sumber tersebut.

Setelah para siswa tertangkap, pihak berwenang mulai meneliti pasar untuk perangkat penyimpanan memori dan CD video yang berisi media asing. Demikian disampaikan seorang penduduk provinsi itu kepada RFA.

"Penduduk semua gemetar ketakutan karena mereka akan dihukum tanpa ampun karena membeli atau menjual perangkat penyimpanan memori, sekecil apa pun," kata sumber kedua, yang meminta anonimitas untuk berbicara dengan bebas.

"Tetapi terlepas dari seberapa ketat tindakan keras pemerintah tampaknya, desas-desus beredar bahwa di antara tujuh siswa yang ditangkap, satu dengan orang tua kaya dapat menghindari hukuman karena mereka menyuap pihak berwenang dengan USD3.000," kata sumber kedua.

"Warga mengeluh bahwa dunia tidak adil karena jika orang tua memiliki uang dan kekuasaan bahkan anak-anak mereka yang dijatuhi hukuman mati dapat dibebaskan." ■ tom

Kapal Migran Terbalik di Selat Inggris, 31 Tewas

PARIS (IM)-Sebanyak 31 orang, termasuk lima wanita dan seorang gadis kecil tewas pada Kamis (25/11) setelah perahu karet mereka terbalik di Selat Inggris saat menyeberang dari Prancis ke Inggris. Ini merupakan bencana terburuk yang melibatkan para migran di perairan yang memisahkan kedua negara itu.

Selat Inggris adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan memiliki arus yang kuat. Perahu-perahu yang kelebihan muatan seringkali nyaris tidak bertahan dan berada di bawah kekuasaan ombak saat mereka mencoba mencapai pantai Inggris.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, mengatakan, sebanyak 34 orang telah berada di dalam perahu karet tersebut. Dalam insiden ini, 31 penumpang meninggal, sementara dua penumpang berhasil diselamatkan dan satu penumpang lain masih hilang.

"Ada dua orang yang selamat, tapi nyawa mereka dalam bahaya, mereka menderita hipotermia parah," ujar Darmanin.

Darmanin mengatakan, kebangsaan dan identitas para migran tidak diketahui. Dia menambahkan, empat pelaku perdagangan manusia yang diduga terlibat dalam kecelakaan itu telah ditangkap. Menurut Darmanin, perahu karet para migran telah mengempis. Ketika penyelamat tiba, perahu itu telah kempis total.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan, badan perbatasan Uni Eropa Frontex harus mendapatkan lebih banyak dukungan keuangan untuk melindungi perbatasan eksternal Uni Eropa (UE), termasuk mencegah kedatangan migran di pantai utara Prancis. Macron juga menyerukan pertemuan darurat kepada para menteri Eropa untuk membahas masalah tersebut.

"Prancis tidak akan membiarkan selat menjadi kuburan," kata Macron. Menurut para nelayan, sebagian besar migran meninggalkan garis pantai Selat Prancis untuk memanfaatkan kondisi laut yang tenang pada Rabu, meskipun airnya sangat dingin. Seorang nelayan, Nicolas Margolle, men-

gatakan kepada Reuters, dia telah melihat dua perahu kecil pada Rabu pagi. Satu perahu berisi beberapa penumpang dan satu perahu lainnya kosong.

Margolle mengatakan, seorang nelayan lain telah menelepon layanan penyelamatan setelah melihat sebuah perahu karet kosong dan 15 orang mengambang di sekitarnya. Tahun ini polisi Prancis telah mencegah lebih banyak penyeberangan daripada tahun-tahun sebelumnya. Mereka hanya membendung sebagian arus migran yang ingin mencapai Inggris. Ini merupakan salah satu dari banyak sumber ketegangan antara Paris dan London.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson terkejut dengan insiden kematian para migran tersebut. Dia menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. "Simpati saya bersama para korban dan keluarga mereka. Bencana ini menggaris-bawahi bahwa menyeberangi Selat dengan cara ini sangat berbahaya," ujar Johnson setelah memimpin rapat darurat Kabinet.

Pemerintah Inggris dan Prancis menyalahkan penyelundup atas masalah migran. Namun sejumlah politisi Prancis, termasuk Wali Jota Calais, Natacha Bouchart menyalahkan Inggris atas masalah tersebut. Bouchart mengatakan, Inggris harus mengubah kebijakan imigrasinya. Sementara beberapa kelompok hak asasi mengatakan, pengawasan yang lebih ketat mendorong para migran untuk mengambil risiko lebih besar saat mereka mencari kehidupan yang lebih baik di Barat.

"Hanya menuntut penyelundup berarti menyembunyikan tanggung jawab otoritas Prancis dan Inggris," kata l'Auberge des Migrants, sebuah kelompok advokasi yang mendukung pengungsi dan orang-orang terlantar.

Sebelumnya, sebanyak 14 orang telah tenggelam ketika berusaha mencapai Inggris. Kemudian pada 2020, tujuh orang migran meninggal dan dua lainnya hilang saat hendak menyeberang ke Inggris. Sedangkan pada 2019 empat orang migran meninggal. ■ gul

Turki Tahan Puluhan Pedemo yang Desak Erdogan Mundur

ISTANBUL(IM)-Sekelompok penunjuk rasa yang memprotes nilai mata uang lira anjlok terlibat bentrok dengan polisi di Istanbul, Turki, pada Rabu (24/11). Sekitar 250 penunjuk rasa turun ke jalan di distrik Kadikoy, Istanbul, mendesak Presiden Recep Tayyip Erdogan mundur dengan meneriakkan slogan "pemerintah mundur!" dan "kami tidak bisa penuhi kebutuhan".

Polisi berupaya membubarkan protes tersebut, menghalangi ratusan pedemo yang ingin menuju alun-alun utama Istanbul.

Seorang fotografer AFP melaporkan setidaknya 30 orang pedemo ditahan polisi selama dalam unjuk rasa tersebut. Sejumlah pedemo perempuan termasuk dari puluhan pemprotes yang ditahan polisi.

Demonstrasi mulai bermunculan di kota-kota besar Turki setelah inflasi lira terus meroket hingga mencapai 15 persen terhadap dolar Amerika Serikat per Selasa (23/11).

Saat ini, 1 dolar AS seharga lebih dari 13 lira. Awal tahun lalu, 1 dolar AS masih dihargai 8 lira.

Di Ibu Kota Ankara, puluhan pedemo juga turun ke jalan guna memprotes harga barang dan kebutuhan yang semakin tinggi akibat inflasi.

"Setiap hari kami bertanya kepada diri sendiri: bagaimana saya akan membayar uang sewa rumah, bagaimana saya bisa bertahan akhir bulan, berapa makanan di supermarket besok," kata seorang guru, Ayse Demirel.

"Itu lah yang kami pikirkan sepanjang waktu dan ini sangat sulit," paparnya menambahkan.

"Belum ada bencana seperti ini dalam sejarah Republik Turki," kata pemimpin oposisi dari Partai Rakyat Republik, Kemal Kilicdaroglu pada Selasa (23/11) lalu.

Kilicdaroglu menyalahkan Erdogan, yang telah memimpin Turki sejak 2003, sebagai penyebab nilai lira yang terus terperosok.

"Pada titik ini, Anda (Erdogan) adalah masalah keamanan nasional mendasar bagi Republik Turki," katanya seperti dikutip Reuters.

Mantan perdana menteri Turki, Ahmet Davutoglu, eks sekutu Erdogan, menganggap kebijakan ekonomi sang presiden merupakan bentuk "pengkhianatan dan bukan soal ketidaktahuan."

Sejauh ini, Erdogan telah memangkas suku bunga bank sentral yang ia yakini dapat menggenjot ekspor, investasi, dan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, sebagian ekonom menilai penurunan suku bunga adalah kebijakan yang "sebrono".

Warga Turki mengatakan bahwa penurunan Lira telah menjungkirbalikkan anggaran rumah tangga dan rencana pada masa depan.

Namun, Erdogan membe-la kebijakan ekonominya dan memperingatkan warganya bahwa Turki kini dalam "perang kemerdekaan ekonomi".

Erdogan juga berkeras enggan menggelar pemilihan umum lebih awal terlepas dari desakan oposisi dan warga. Ia mengatakan pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal yakni pada Juni 2023. ■ ans

Jerman akan Legalkan Ganja

BERLIN(IM) - Pemerintah baru Jerman memutuskan akan melegalkan ganja. Keputusan ini hasil dari perjanjian koalisi Partai Sosial Demokrat Jerman, Partai Demokrat Bebas dan Partai Hijau yang mencakup ketentuan untuk mendekriminalisasi konsumsi zat tersebut.

Dokumen dari perjanjian itu telah diperoleh media Jerman. Laporan media setempat mengatakan bahwa pemerintah akan membuat sistem distribusi ganja yang terkontrol kepada orang-orang dewasa untuk konsumsi ganja melalui toko-toko berlisensi.

"Koalisi ingin menerapkan kontrol ketat terhadap produk untuk memastikan kualitasnya dan melindungi anak di bawah umur," bunyi dokumen perjanjian itu, yang dilansir Russia Today, Kamis (25/11).

Rencana "traffic light coalition" untuk melegalkan ganja rekreasi dibocorkan pekan lalu ke media Jerman oleh sumber-sumber di ketiga

partai tersebut. Sekadar diketahui, ganja sebagai obat telah legal di Uni Eropa sejak 2017. Sedangkan untuk rekreasi baru akan dilegalkan di Jerman.

Putaran terakhir dari pembicaraan koalisi tiga arah diadakan di Berlin. Partai Sosial Demokrat pimpinan Olaf Scholz diatur untuk mengambil kursi kanselir, menggantikan pemimpin veteran Jerman Angela Merkel, yang memilih pensiun.

Partai Persatuan Demokratik Kristen (CDU), partai konservatif kubu Merkel, dan sekutunya; Persatuan Sosial Kristen (CSU) di Bavaria menunjukkan kinerja yang buruk dalam pemilihan umum September lalu, sementara partainya Scholz mencetak keuntungan besar.

Partai Sosial Demokrat (SPD) lebih suka bersekutu dengan Partai Hijau yang berhaluan sayap kanan dan Partai Demokrat Bebas (FDP) daripada mencari yang baru, yang disebut "Koalisi Besar" dengan Partai Demokrat Kristen. ■ gul

Mimpi Putra Muamar Qadafi Jadi Presiden Libya Kandas

TRIPOLI(IM)- Mimpi putra mendiang pemimpin Libya Muammar Qadafi, Saif Qadafi, untuk bertaruh dalam pemilihan presiden (pilpres) harus dikubur dalam-dalam. Pasalnya, komisi pemilihan negara itu mencoretnya dari pencalonan dalam pemilihan presiden 24 Desember mendatang.

Media lokal melaporkan komisi pemilihan Libya menolak pencalonan Saif al-Islam Qadafi, dengan "alasan hukum", bersama beberapa kandidat seperti dilansir dari BBC, Kamis (25/11).

Qadafi telah memicu kontroversi setelah dia mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai presiden.

Dia diburu oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang dan pembunuhan yang dilakukan ketika ayahnya memerintah negara Afrika Utara itu.

Pencalonan orang kuat lain, Jenderal Khalifa Haftar, juga menyebabkan kegemparan di negara itu karena dia menghadapi tuntutan pidana di pengadilan Amerika Serikat (AS). Namun tidak jelas apakah dia termasuk di antara mereka yang pencalonannya ditolak.

Jaksa militer Libya telah meminta komisi pemilihan untuk berhenti memproses dokumen pencalonan Qadafi

dan Haftar sampai mereka menjawab pertanyaan atas tuduhan tersebut.

Saif Qadafi mendaftar untuk mencalonkan diri pada 14 November. Dalam pengumuman yang mengjutkan, Saif, yang keberadaannya telah dirahasiakan selama beberapa bulan, menjadi kandidat kelas berat pertama yang mendaftar untuk persaingan dalam pemilihan presiden.

Dilansir dari France24, ia telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Tripoli pada tahun 2017 karena kejahatan yang dilakukan selama pemberontakan yang menggulingkan ayahnya. Dia kemudian diampuni oleh pemerintahan saingan Tripoli di Libya timur.

Pada bulan Juli, dia muncul setelah bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang dan mengatakan kepada The New York Times bahwa dia merencanakan comeback politik.

Dalam sebuah wawancara langka, Saif mengatakan dia ingin memulihkan persatuan yang hilang di Libya setelah satu dekade kekacauan.

Enam puluh orang mengajukan aplikasi untuk mencalonkan diri sebagai presiden Libya pada batas waktu Senin.

Aktivis hak-hak perempuan Leila Ben Khalifa (46) adalah satu-satunya calon perempuan. ■ ans



PIDATO WAPRES KOMISI EUROPA

Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans menyampaikan pidato tentang hasil KTT COP26 di Glasgow, di Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis, Rabu (24/11).



IMIGRAN MENYEBERANGI SELAT INGGRIS

Sekelompok imigran berjumlah lebih dari 40 orang berseru setelah berhasil menaiki perahu karet, saat meninggalkan pesisir Prancis utara untuk menyeberangi Selat Inggris, dekat Wimereux, Prancis, Rabu (24/11).

Baru Diangkat, PM Perempuan Pertama Swedia Mengundurkan Diri

STOCKHOLM(IM) - Kabar mengejutkan datang dari Swedia. Perdana Menteri perempuan pertama negara itu, Magdalena Andersson, mengundurkan diri hanya beberapa jam setelah diangkat.

Andersson mengundurkan diri setelah mitra koalisinya mundur dari pemerintah dan anggarannya ditolak oleh parlemen. Sebaliknya, parlemen Swedia memilih anggaran yang disusun oleh kelompok oposisi yang mencakup sayap kanan anti-imigran.

"Saya telah mengatakan kepada ketua parlemen bahwa saya ingin mengundurkan diri," kata Andersson kepada wartawan seperti dikutip dari BBC, Kamis (25/11).

Dia menambahkan bahwa dia berharap untuk mencoba dan menjadi perdana menteri lagi sebagai pe-

mimpin pemerintahan partai tunggal.

"Ada praktik konstitusional bahwa pemerintah koalisi harus mengundurkan diri ketika satu partai mundur," kata pemimpin partai Sosial Demokrat itu.

"Saya tidak ingin memimpin pemerintahan yang legitimasinya dipertanyakan," ia menambahkan.

Sebelumnya Andersson terpilih sebagai perdana menteri pada hari Rabu karena di bawah hukum Swedia, dia hanya membutuhkan mayoritas anggota parlemen untuk tidak memberikan suara menentang.

Seratus tahun setelah perempuan Swedia diberi hak suara, pemimpin Sosial Demokrat berusia 54 tahun itu mendapat tepuk tangan meriah dari beberapa bagian parlemen, atau Riksdag. ■ gul